

## TINGKAT KEMAMPUAN DESA DALAM MELAPORKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KECAMATAN DELIMA KABUPATEN PIDIE

Maisur<sup>1</sup>, Cut Hamdiah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> FKIP Ekonomi Universitas Jabal Ghafur

<sup>2</sup> Akuntansi, Universitas Serambi Mekkah

e-mail: maisur@unigha.ac.id, cuthamdiah@usm.ac.id

### ABSTRACT

The purpose of this study was to see the level of village capacity in reporting accountability reports on the use of village funds in the Delima sub-district, Pidie district. The sample in this study were 44 financial groups. In determining the sample using saturated sampling and field research methods. While the analytical tool used is multiple linear regression. From the results of the analysis, it is found that the village's ability to report accountability reports is dominated by HR factors on educational background indicators, information technology on application update indicators, supporting facilities on internet indicators, internal control systems on multiple positions indicators, and the rule of law on minimal indicators. understanding of laws and regulations. The implication of this research for the working unit is that it can improve the quality of timely submission of financial reports.

**Keywords :** Financial Reports, Human Resources, Information Technology

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk Melihat Tingkat Kemampuan Desa Dalam Melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 44 kaur keuangan. Dalam penentuan sampel menggunakan sampling jenuh dan metode field research. Sedangkan alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Dari hasil analisis diperoleh tingkat kemampuan desa dalam melaporkan laporan pertanggung jawaban yang didominasi oleh faktor SDM pada indikator latar belakang pendidikan, teknologi informasi pada indikator update aplikasi, sarana pendukung pada indikator internet, sistem pengendalian intern pada indikator rangkap jabatan, dan aturan hukum pada indikator minim pemahaman peraturan perundang-undangan. Implikasi penelitian ini terhadap satker adalah dapat meningkatkan kualitas penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu.

**Kata kunci:** Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Informasi Teknologi

### Pendahuluan

Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Anggaran tersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa

dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (good governance) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas (Astri, Grace dan Herman, 2016). Banyak faktor yang menghambat akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah desa, hal ini disebabkan oleh adanya target penggunaan dana yang belum terealisasi dengan baik, bahkan faktor sumberdaya manusia yang berada dalam pemerintah desa tersebut yang kurang profesional dalam menyusun pelaporan keuangan desa. Sehingga mempengaruhi ketepatan waktu pertanggungjawaban keuangan desa, Tepat waktu sangat diperlukan dalam penyampaian laporan kepada pihak-pihak yang membutuhkan karena pihak yang membutuhkan laporan untuk menghadapi masalah-masalah yang bersifat mendadak dan membutuhkan pembuat laporan yang bisa diusahakan secepat-cepatnya dibuat dan disampaikan (Dewi et al., 2019). Dalam pengelolaan keuangan pemerintahan desa yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dengan pemahaman akuntansi yang memadai didukung pelatihan serta latar belakang pendidikan yang sesuai.

Oleh karena itu permasalahan yang terjadi di desa-desa yang ada diwilayah Kecamatan Delima, berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh tim peneliti di kantor BPMG didapatkan banyaknya desa yang pelaporan keuangannya tidak tepat

waktu, bahkan melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Hal ini semakin menunjukkan kurang maksimalnya kinerja Pemerintah Desa di sebagian Kecamatan Delima dalam menangani laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Hasil pengamatan dari laporan penyaluran dan realisasi penggunaan dana desa tahap I tahun 2019 di desa-desa yang berada di Kecamatan Delima, rata-rata realisasi penggunaan dana desa hanya mencapai 60%. Dan realisasi penggunaan dana desa tahap II masih berada dibawah 50% (BPMG Pidie,2020). Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tim peneliti ingin melakukan penelitian secara mendalam tentang Tingkat Kemampuan Desa Dalam Melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie

### Metode

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, yang meliputi 44 Gampong dan 70% diindikasikan mengalami permasalahan keterlambatan laporan pertanggung jawaban. Populasi dan sampel Penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sehingga besaran sampel semua bendahara desa di Kecamatan Delima sebanyak 44 orang. Teknik Pengumpulan dilakukan dengan cara : a). Wawancara (interview) langsung dengan pihak-pihak yang berkompetisi untuk memperoleh data penelitian. b). Kusioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan memberikan dan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yaitu bendahara desa. c) Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa buku-buku yang memuat data-data tentang kebijakan dana desa, Aturan-aturan pengelolaan dana desa, data dari desa Analisis data dengan menggunakan metode regresi linier berganda.

## Hasil dan Pembahasan

Untuk menguji kelayakan butir-butir kuisioner maka digunakan pengujian validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas menunjukkan r-hitung sama dengan atau lebih besar dari r-kritis, maka dikatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Hasil keseluruhan dari pengujian validitas data dapat dilihat Pada Tabel 1 di bawah ini

Tabel 1.

### Uji Validitas

Variabel	Item	Koefisien korelasi	Nilai kritis (N=44)	Ket
Sumber Daya Manusia (X <sub>1</sub> )	X <sub>1.1</sub>	0,364	0,257	Valid
	X <sub>1.2</sub>	0,576		Valid
	X <sub>1.3</sub>	0,769		Valid
	X <sub>1.4</sub>	0,393		Valid
Informasi Teknologi (X <sub>2</sub> )	X <sub>2.1</sub>	0,667	0,257	Valid
	X <sub>2.2</sub>	0,521		Valid
	X <sub>2.3</sub>	0,457		Valid
	X <sub>2.4</sub>	0,574		Valid
Pengendalian Internal (X <sub>3</sub> )	X <sub>3.1</sub>	0,667	0,257	Valid
	X <sub>3.2</sub>	0,517		Valid
	X <sub>3.3</sub>	0,745		Valid
	X <sub>3.4</sub>	0,445		Valid
Ketepatan Waktu (Y)	Y <sub>1.1</sub>	0,497	0,257	Valid
	Y <sub>1.2</sub>	0,748		Valid
	Y <sub>1.3</sub>	0,523		Valid
	Y <sub>1.4</sub>	0,415		Valid

Sumber Data diolah, 2022

Untuk dapat melihat bahwa variabel-variabel tersebut harus dilakukan pengujian reliabilitas sehingga mendapatkan hasil menunjukkan bahwa semua indikator dari masing-masing variabelnya telah sesuai.

Tabel 2.

### Uji Reliabilitas

No	Variabel	Pertanyaan	Cronbach Alpha	Hasil
1	Sumber Daya Manusia	4	0,788	Reliabel
2	Informasi Teknologi	4	0,747	Reliabel
3	Pengendalian Internal	4	0,788	Reliabel
4	Ketepatan Waktu	4	0,867	Reliabel

Sumber Data diolah, 2021

Pengujian statistik dengan alat analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh sumberdaya manusia, informasi teknologi dan pengendalian

terhadap ketepatan waktu. Hasil analisis linier berganda dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3  
Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.215	2.558		2.039	.049
Sumber Daya Manusia	.311	.191	.274	2.629	.011
Informasi Teknologi	.305	.159	.356	2.918	.042
Pengendalian internal	.302	.106	.319	2.852	.007

a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu

$$Y = 4,215 + 0,311X_1 + 0,305X_2 + 0,302X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, didapat nilai B sebesar 4,215, nilai koefisien untuk variabel sumber daya manusia sebesar 0.311, koefisien untuk variabel informasi teknologi sebesar 0,305 dan koefisien untuk variabel informasi teknologi sebesar 0,302.

## Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Dari hasil analisis didapatkan thitung = 2.629 > ttabel = 1.680 dan signifikan = 0,011 < α = 0,05. Dengan demikian H1 diterima dan Ho ditolak, artinya sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada tingkat signifikansi α = 0.05.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu indikator ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan dan lemahnya sumber daya manusia akan berakibat terhadap keterlambatan terhadap pelaporan keuangan. suatu laporan yang terlambat akan mengurangi atau menghilangkan relevansinya. Hal ini akan berdampak pada pemanfaatan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. selain itu, hal ini juga akan berdampak pada kepercayaan stakeholder terhadap pelaksanaan kegiatan. Seperti yang terjadi di desa-desa dalam Kecamatan Delima. Indikasi dari sumber daya manusia di latar belakang oleh pendidikan, oleh karena itu bendahara desa

harus memiliki kualifikasi pendidikan sebidang, namun kenyataannya rata-rata bendahara tidak sesuai dengan bidang keilmuan, bahkan pendidikan mereka lulusan tingkat Sekolah Menengah Umum. Fakta ini di perkuat dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa kepala desa, bahwa rata-rata kepala desa mengeluhkan minimnya lulusan yang kualifikasi bidang ilmu akuntansi dan terjadinya hambatan yang tidak membolehkan perekrutan sumber daya dari luar berdasarkan aturan pemerintah. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Astuti (2019) bahwa sumberdaya sangat mempengaruhi terhadap ketepatan pelaporan keuangan, bahkan dengan SDM yang handal akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami).

### **Pengaruh Informasi Teknologi terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan**

Dari hasil analisis diperoleh  $t_{hitung} = 2.918 > t_{tabel} = 1.680$  dan signifikan sebesar  $0,042 < \alpha = 0,05$ , artinya informasi teknologi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada tingkat signifikansin  $\alpha = 0,05$  atau 5%, dengan demikian maka H2 diterima.

Artinya bahwa Penggunaan informasi teknologi akan meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dari proses penyusunan pelaporan keuangan. Dengan teknologi informasi, penyusunan laporan keuangan diharapkan lebih cepat dan akurat sehingga keterandalan pelaporan keuangan juga dapat meningkat. fakta dilapangan menunjukkan bahwa pelaporan keuangan yang terjadi di desa-desa terjadi keterlambatan, faktornya adalah Lemahnya dalam penguasaan informasi teknologi sehingga mengakibatkan terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan. hasil penelitian ini secara empiris mendukung penelitian yang dilakukan (Ramzizah, 2020) yang menunjukkan bahwa informasi teknologi sangat mempengaruhi ketepatan

waktu pelaporan keuangan dan dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan beberapa bendahara dimana mereka mengakui lemahnya pemahaman tentang aplikasi yang diberikan pemerintah untuk proses pelaporan pertanggung jawaban.

### **Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan**

Dari hasil analisis diperoleh  $t_{hitung} = 2.852 > t_{tabel} = 1.680$  dan signifikan sebesar  $0,007 < \alpha = 0,05$ , artinya pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada tingkat signifikansin  $\alpha = 0,05$  atau 5%, dengan demikian maka H3 diterima.

### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa sumberdaya manusia, informasi teknologi dan pengendalian internal merupakan faktor terjadinya keterlambatan pertanggung jawaban laporan keuangan pada desa-desa di Kecamatan Delima. Sumber daya manusia dapat menyebabkan keterlambatan, sehingga tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Hal ini disebabkan penempatan kaur keuangan atau bendahara dengan latar belakang pendidikan yang belum sesuai dengan bidangnya. Begitu juga dengan informasi teknologi, dimana bendahara sangat minim terhadap penguasaan berbagai macam aplikasi pelaporan keuangan diantaranya aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) serta minimnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa seperti komputer dan jaringan internet. Hal yang sama akan terjadi terhadap keterlambatan pelaporan keuangan apabila pengendalian internal lemah. Pengendalian internal lemah disebabkan oleh karenakan tidak adanya pembagian tugas yang baik dalam organisasi tersebut sehingga pegawai mempunyai rangkap jabatan dalam menjalankan tugas.

### Daftar Pustaka

- Astuti, C. D. (2019). Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.25105/jipak.v2i1.4425>
- Budiyanto, S., & Muncar Aditya, E. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN(Studi Empiris Perusahaan Food and Beverages Periode 2010-2012). *Fokus Ekonomi*, 10(1), 77–87.
- Dewi, N. F., Ferdous Azam, S. M., & Yusoff, S. K. M. (2019). Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability. *Management Science Letters*, 9(9), 1373–1384. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.5.013>
- Dzomira, S. (2014). Internal Controls and Fraud Schemes in Not-For-Profit Organisations: A Guide for Good Practice. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(2), 118–126.
- Fung, B. (2014). Tuntutan dan kebutuhan akan transparansi dan keterbukaan dalam tata kelola perusahaan. *Universal Manajemen*, 2(2), ., 72–80.
- Hutapea, P., & Thoha, N. (2008). Kompetensi Komunikasi Plus: Teori, Desai, Kasus, dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang dinamis.Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Isaiah, S. U. (2012). Human Resource Management and Organizational Achievement: Case Study of the Lagos State Education District III. *Compilation of Good Practices in Statistical Offices*, 1–64. <http://docplayer.net/5960026-Human-resource-management-and-organizational-achievement.html>
- Kalangi, R. (2015). Pengembangan sumber daya manusia dan kinerja aparat sipil negara di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 2(1), 1–18.
- Maisur, N. U. (2019). PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KINERJAMANAJERIAL (Study Kasus pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) di Kabupaten Pidie). *I(I)*, 29–37.
- Modo, S. M., Saerang, D. P. E., & Poputra, A. T. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 7(2), 14–30. <https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13550>
- Ramziah, M. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Terhadap Pengawasan Anggaran Dana Desa Di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. *Jurnal Sains Riset*, 9(3), 1–8. <https://doi.org/10.47647/jsr.v9i3.156>
- Suharto, A. A. (2012). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, KOMitmen Dan MOTivasi Terhadap Kinerja

Pegawai Pada inspektorat kabupaten  
kediri. Ilmu Manajemen, 3, 67–79.

Muljono, Djoko (2012) Pengaruh  
Perpajakan pada Penerapan Standar

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa  
Akuntabilitas Publik, (Yogyakarta:  
ANDI, 2012), hal. 10